

**PERAN SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIALDALAM
PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN HUKUM
DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial Jurusan
Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Konsentrasi Kesejahteraan Sosial pada
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh:

ALLEN DWI P.W
NIM: 50300110003

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Allen DwiPrayogoWidyono
NIM : 50300110003
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 24April 1991
Jur.Prodi/Kons : PMI/Kesejahteraan Sosial
Fakultas/Program : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Jl. MakawariLr. II, SamataGowa.
Judul :PeranSatuanBaktiPekerjaSosialDalamPembinaan
AnakBerhadapanHukum Di Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, September 2015

Penyusun,

Allen Dwi P.W.

NIM : 5030011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul,
“Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Anak Berhadapan Hukum Di Kota Makassar”, yang disusun oleh Allen Dwi P.W, NIM: 50300110003, mahasiswa Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial (dengan beberapa perbaikan).*

Makassar, September 2015

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr.H. Muh. Kurdi, M.HI (.....)
Pembimbing II : Drs.Abd. Wahab,MM (.....)
Munaqisy I : Dr. Muh. Shuhufi, M.Ag (.....)
Munaqisy II : Nuryadi Kadir, S.Sos,MA (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar,

Dr. H Abd.Rasyid Masri, S.Ag, M.Pd, M.Si, MM
NIP. 19690827 199603 1 004

KATA PENGANTAR

يَوْمَ مَلِكٍ ۝ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ ۝ الْعَلَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ ۝ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ
لَّذِينَ صِرَاطَ ۝ الْمُسْتَقِيمِ الصِّرَاطَ أَهْدِنَا ۝ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ الدِّينَ
الضَّالِّينَ وَلَا عَلَيْهِمُ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ عَلَيْهِمُ أَنْعَمْتَ

Puji syukur penulis lantunkan kehadiran Allah *Rabbul Izzati* atas segalalimpahan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat tetap tercurah kepada Rasulullah S.A.W., karena berkat perjuangannya sehingga Islam masih eksis sampai sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan tantangan karena keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan ilmiah, waktu, biaya, dan tenaga. Tetapi dengan komitmen yang kuat serta adanya petunjuk dan saran-saran berbagai pihak, semua rintangan dan tantangan dapat diminimalkan. Karena itu saya mempersembahkan karyaku ini buat kedua orang tuaku Ayahanda Waryono, ibunda tercinta Widyaningsih, Dan terkhusus Almarhumah Lia Widiana kakak yang telah menopang segala kekurangan dari adindanya. Merkalah yang tidak henti-hentinya mencurahkan do'a, kasih sayang serta motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor sementara UIN Alauddin Makassar atas penyediaan sarana dan prasarannya sehingga dapat melaksanakan proses perkuliahan dengan baik.
2. Dr. Hj. Muliaty Amin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar atas pelayanan dan kepemimpinannya selama penulis belajar di fakultas ini mulai dari awal sampai pada penyelesaian studi.
3. Dra. Irwanti Said, M. Pd dan Dra. St. Aisyah BM, M. Sos. I., masing-masing Ketua dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Beserta Staf Ahli Jurusan Kakanda Suharyadi, SH.I yang telah senantiasa membantu saya dalam pengurusan administrasi selama masa menjadi mahasiswa.
4. Dr.H. Muh. Kurdi, M.HI dan Drs.Abd. Wahab,MM selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberi petunjuk, nasehat, dan bimbingannya sejak awal sampai rampungnya skripsi ini.
5. Dr. Muh. Shuhufi, M.Ag dan Nuryadi Kadir,Sos.MA selaku Munaqisy I dan Munaqisy II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan demi menyempurnakan skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dorongan dan arahan selama penulis belajar sampai penyelesaian studi.
7. Teman-teman seperjuangan di organisasi intra dan extra, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) PMI/KESSOS periode 2010-2014, Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Indonesia (FORKOMKASI) Organisasi yang saat ini masih

saya pimpin di Regional Sulawesi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yang sudah memberikan pengalaman organisasi selama proses study di kampus, juga ke pada Prof.Dr.H. Azhar Arsyad. MA yang selama penulis berada di sulawesi telah memberikan ijin untuk bertempat tinggal di kediaman beliau sekaligus mengizinkan penulis mengambil refrensi buku di perpustakaan pribadi beliau.

8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dengan rela membantu penulis baik secara moril maupun secara materil.

Oleh karena itu, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, tiada yang dapat penulis persembahkan selain do'a, semoga amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan pahala disisi Allah swt. Dan dengan rendah hati penulis memohon maaf, sekaligus akan berusaha untuk memperbaiki jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, baik secara substansi maupun secara metodologis.

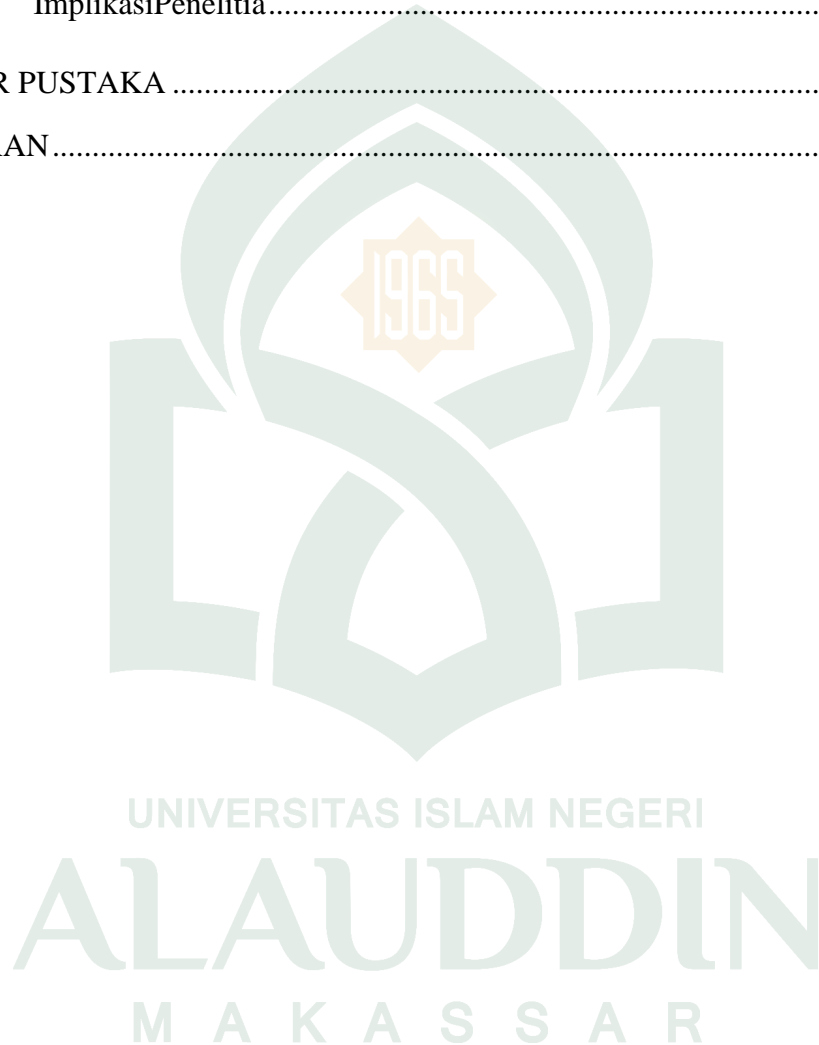
Makassar, September 2015
Penulis,

Allen Dwi P.W
NIM. 50300110003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Penelitian terdahulu.....	7
E. Waktu Penelitian	10
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	12
A. Pengertian Peran	12
B. Teori Tentang ABH.....	14
C. Peran Pekerja Sosial	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Hasil Sajian Data	44
C. Kinerja Sakti Peksos Kota Makassar	46

D.	Langkah Penanganan Dan Pembinaan Anak Berhadapan	48
E.	Peluang Dan Tantangan dalam Penanganan Anak	53
BAB V PENUTUP		59
A.	Kesimpulan	59
B.	Implikasi Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		65



ABSTRAK

Nama : Allen Dwi Prayogo Widyono
NIM : 50300110003
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi/PMI Kons. Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : “Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar”

Skripsi ini membahas tentang Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar. Masalah yang diangkat adalah: Bagaimana Pelaksanaan Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial terhadap Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar?, Bagaimana Bentuk Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar? Bagaimana faktor Pendukung dan Penghambat Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Bermasalah Hukum di Kota Makassar?.

Metodologi penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara alternatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivitas (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti, orientasi politik, isu, kolaboratif atau orientasi perubahan) atau keduanya.

Permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat kompleks, mulai dari kasus, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, judi, narkoba, dan berbagai kasus lainnya. Maka dari itu hasil dari penelitian ini adalah Sakti Peksos memiliki peluang besar dalam memberikan penguatan mental dan pemenuhan hak-hak dasar Anak Berhadapan Hukum. Untuk itu peran Sakti Peksos sangat dibutuhkan dalam memperbaiki masalah anak yang telah berurusan dengan hukum, sekalipun dalam prosesnya terdapat kelemahan yang masih harus dihindari demi terlaksananya tujuan kerja Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) Cluster Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Sebagai kesimpulan, penting bagi Sakti Peksos untuk meningkatkan peran dan kinerja dalam pembinaan anak berhadapan hukum agar masalah klien benar-benar terselesaikan. Memperbaiki pola pembinaan sehingga lebih menarik bagi klien, terutama muatan materi pembinaan yang diupayakan semaksimal mungkin. Menjalin kerjasama terhadap seluruh kalangan, baik dari pemerintah, penegak hukum, relawan, maupun seluruh unsur masyarakat sehingga perbaikan mental anak bisa menjadi lebih

baik. Sakti Peksos adalah sebuah organisasi memberikan salah satu solusi terbaik dalam penanganan anak berhadapan hukum di kota makassar.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial di Indonesia dewasa ini sudah semakin meluas dan kompleks. Ada masalah sosial yang disebabkan karena sistem yang kurang tepat sasaran dan juga karena sengaja dilakukan oleh oknum tertentu. Masalah sosial sebagai fokus kerja Kementerian Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di Indonesia antara lain adalah: anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak nakal, anak jalanan, anak cacat, wanita rawan sosialekonomi, wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, lanjut usia terlantar, lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, penyandang cacat, penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis, tunasusila, pengemis, gelandangan, bekas narapidana, korban penyalahgunaan napza, keluarga fakir miskin, rumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran terlantar, keluarga rentan kemiskinan, penyandang AIDS/HIV serta *anak bermasalah hukum*.

Penanggung jawab utama dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun dalam

beberapa jenis PMKS Kementerian Sosial tetap membutuhkan relasi dari berbagai kementerian, lembaga negara maupun relawan yang bekerja untuk kemanusiaan.

Masalah yang terjadi saat ini di Indonesia adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa. Kekuatan SDM bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan sosial, termasuk permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah anak yang membutuhkan pelayanan sosial adalah: Anak Balita terlantar (1.405 anak), Anak terlantar (135.014 anak), Anak Jalanan (6.173 anak), Anak berhadapan hukum (430), Anak dengan kecacatan (2.041 anak), Anak yang memerlukan kebutuhan khusus (2.258 anak).¹ Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum masih sangat jauh dari harapan sebagaimana yang terjadi saat ini.

Untuk keluar dari permasalahan sosial dan permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia tidak bisa dilakukan secara cepat sehingga dibutuhkan persiapan yang matang untuk mendidik generasi bangsa sehingga siap menjadi bagian dalam aktor menuju tercapainya pemenuhan kesejahteraan sosial. Meski demikian, generasi muda yang menjadi harapan bangsa justru sedang menghadapi problematika yang berat. Generasi muda telah diperhadapkan pada beberapa kasus antara lain; perkalahian, pencurian, narkoba, penganiayaan, tawuran, pencabulan, *gank* motor, perjudian dan masalah-masalah lainnya. berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh penulis

¹Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Anggaran PKSA, (Jakarta: 2010), h. 1

menemukan data yang dihimpun melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) kota Makassar menyebutkan jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk tahun 2014 sejumlah 40 (empat puluh) orang. Sementara itu, jumlah pekerja sosial yang dalam hal ini bertugas melakukan pendampingan anak berhadapan hukum sebanyak 7 (tujuh) orang.²

Pembinaan anak, terutama anak berhadapan hukum yang lebih baik adalah ketika dibina oleh keluarga. Keterangan tersebut dapat dipahami melalui firman Allah dalam QS.. (Al-Munaafiquun:9), sebagai berikut:

الْخَسِرُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ ذَٰلِكَ يَفْعَلُ وَمَنِ اللَّهُ ذِكْرٍ عَنْ أَوْلَادِكُمْ وَلَا أَمْوَالِكُمْ تَلْهَكُمُ لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.³

Orang tua sering kali lengah dan salah persepsi tentang kasih sayang terhadap anak. Orang tua cenderung memikirkan harta semata guna memenuhi kebutuhan sang anak. Sehingga tugas sebagai guru dalam pembinaan mental keagamaan sering kali terabaikan dan lebih sering menyerahkannya kepada pihak sekolah atau pun TK/TPA.⁴

²Aswita Amansyah, Pekerja Sosial Profesional bidang Sakti Peksos, *Wawancara*, di kantor LKSA Salodong, kota Makassar, senin, 13 Oktober 2013.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: As-Syifa, 1998),

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.88

Pembinaan secara kekeluargaan dengan penguatan mental dibantu pekerja sosial yang yaitu sakti peksos masih jauh lebih baik. Tentu pembinaan di panti sosial dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial yang profesional, lebih parah lagi ketika anak yang masih labil harus menerima proses hukum di lembaga pemasyarakatan berdasarkan keputusan pengadilan. Karena ketika anak berhadapan hukum yang memang memiliki karakter nakal, ketika berkumpul akan menambah pengetahuan baru bagi anak tentang cara-cara yang tidak benar dalam mengurus sesuatu.

Peranan pekerja sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial, khususnya penanganan anak berhadapan hukum sangat di butuhkan. Penanganan yang dimaksud adalah pendampingan anak yang telah melakukan pelanggaran sehingga harus berhadapan dengan hukum. Untuk menjawab kebutuhan akan kerukunan, keamanan dan status sosial yang bebas bergaul dalam masyarakat tanpa adanya tekanan batin karena telah melakukan pelanggaran hukum, maka pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang salah satu programnya adalah pendampingan anak berhadapan hukum. Pekerja sosial yang bertugas melakukan pendampingan ABH adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).

Anak berhadapan hukum yang didampingi oleh Sakti Peksos di Kota Makassar melakukan pendampingan dengan berbagai cara sesuai dengan kasus yang telah diperbuat oleh anak tersebut. Untuk itu, penulis menilai sangat penting untuk mengetahui peran Sakti Peksos dalam pembinaan anak berhadapan hukum di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah penelitian ini sesuai dengan permasalahan, maka berikut ini diuraikan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan peran satuan bakti pekerja sosial terhadap anak berhadapan hukum di Kota Makassar?
2. Bagaimana bentuk pembinaan anak berhadapan hukum di Kota Makassar?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat satuan bakti pekerja sosial dalam menangani anak bermasalah hukum di Kota Makassar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini di fokuskan mengenai peranan sakti peksos dalam pembinaan anak berhadapan hukum di kotaMakassar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap judul “Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar” maka penting diuraikan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.

Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.⁵ Yang dimaksud peran dalam penelitian ini adalah serangkaian perilaku yang dilakukan oleh variabel terikat (sakti peksos) yang mempengaruhi variabel bebas (anak berhadapan hukum).

b. Satuan Bakti Pekerja Sosial

Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) adalah pekerja sosial yang direkrut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan anak yang dirumuskan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program pendampingan yang diselenggarakan oleh Sakti Peksos antara lain: *Cluster* anak balita terlantar, anak membutuhkan perlindungan khusus, anak dengan kecacatan, anak jalanan serta anak terlantar.

Yang dimaksud dengan sakti peksos dalam penelitian ini adalah pekerja sosial untuk PKSA yang menangani anak berhadapan dengan hukum.

c. Pembinaan

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain. Pembinaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah segala upaya yang dilakukan oleh sakti peksos dalam kaitannya

⁵Friedman, Marilyn M. (1992). *Family Nursing - Theory & Practice*. (alih bahasa Jakarta: EGC), h. 287

dengan peningkatan kualitas hidup anak berhadapan dengan hukum di Kota Makassar.

d. Anak Berhadapan Hukum

Dalam undang-undang tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Meski demikian, khusus untuk penanganan anak berhadapan hukum oleh LKSA menyebutkan bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) berada pada usia 6 – 18 tahun.

e. Kota Makassar

Kota Makassar yang dimaksud pada Penelitian ini adalah Kota yang berada pada Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Lebih rincinya lokasi penelitian berada pada beberapa tempat yaitu Sekretariat Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) Provinsi Sulawesi Selatan di Jl. AP. Pettarani (dinas sosial provinsi Sul.Sel), penelitian tentang ABH berada di sekisaran Jl. Veteran dan Jl. Andi Tonro Kota Makassar, dimana kasus kenakalan anak yang berujung kepada kasus ABH banyak terdapat di daerah yang telah di sebutkan.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa referensi terkait dengan penelitian “Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar”. Adalah sebagai berikut:

⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, BAB I Pasal 1 ayat

- 1) Penelitian Tesis dengan judul “Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Sosiologis terhadap Implementasi UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 3 Tahun 1997)” oleh “Agus Sudaryanto” Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007.⁷

Pada penelitian tersebut “Agus Sudaryanto” menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Penelitian tersebut berdimensi dan menjelaskan tentang Pola pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan system pemasyarakatan Indonesia adalah pola pembinaan terpadu, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan yang ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Mengingat perkembangan perhatian masyarakat Internasional terhadap anak maka dalam pelaksanaan pola pembinaan dalam system masyarakat ini. Diharapkan

⁷Agus Sudaryanto, *Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Sosiologis terhadap Implementasi UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 3 Tahun 1997)* Penelitian Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007.

dapa diintegrasikan adanya penegasan tentang upaya pengalihan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari jalur pengadilan ke jalur luar pengadilan.

Kaitan penelitian tersebut adalah sama-sama mengamati pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaannya adalah, pada penelitian Agus Sudaryanto meneliti Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan sedangkan pada Penelitian ini meneliti Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pada penelitian ini, pembinaan dilakukan oleh pekerja sosial yaitu Satuan Bakti Pekerja Sosial.

- 2) Penelitian Skripsi dengan judul “Konsep Diri Remaja Laki-laki yang Berhadapan Dengan Hukum” Oleh “Ayu Rafida al-Hafids” Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegipranata Semarang Tahun 2012.

Pada penelitian tersebut “Ayu Rafida al-Hafids” juga menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Penelitian tersebut berdimensi dan menjelaskan bahwa tidak semua anak yang bermasalah dengan hukum memiliki konsep diri yang negatif. Konsep diri terbentuk berdasarkan pengalaman masing-masing individu. Pada dasarnya remaja yang bermasalah dengan hukum, memiliki permasalahan yang sama. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja tersebut adalah bentuk kompensasi akan masalah psikis yang dihadapinya di lingkungan keluarga. Remaja-remaja itu kemudian mencari pemuasan kebutuhan dengan berperilaku nakal.

Umpan balik dari lingkungan berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri masing-masing remaja. Remaja dengan umpan balik dari lingkungan yang positif cenderung mengembangkan konsep diri yang positif, seperti yang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga dirinya mengembangkan konsep diri yang positif. Remaja yang memperoleh umpan balik yang negative cenderung mengembangkan konsep diri yang negative, seperti remaja yang mendapat umpan balik negatif dari lingkungan teman sebayanya di lingkungan masing-masing, sehingga remaja tersebut merasa tidak diterima dan mengembangkan konsep diri yang negatif.⁸

Hubungan dengan penelitian ini sama-sama mengangkat Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai salah satu variabelnya. Pada penelitian tersebut mengamati konsep diri (psikologi) remaja yang mengalami permasalahan hukum, sedangkan pada penelitian ini, mengamati model pendampingan yang diberikan pada ABH.

Dari kedua penelitian di atas dan sejauh kajian dan bacaan tentang pembinaan terhadap anak berhadapan hukum, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar. Dengan demikian, belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu.

E. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini kurang lebih satu bulan, dan maksimal berkisar dua bulan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23

⁸Ayu Rafida al-Hafids, *Konsep Diri Remaja Laki-laki yang Berhadapan Dengan Hukum*, Penelitian Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegipranata Semarang Tahun 2012.

Februari sampai selesai terhitung sejak pengesahan draft proposal, penerbitan surat rekomendasi penelitian, hingga tahap pengujian hasil riset.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kinerja program kesejahteraan sosial anak melalui satuan bakti pekerja sosial di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui bentuk pembinaan anak berhadapan hukum serta masalah-masalahnya di Kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui peran satuan bakti pekerja sosial dalam melakukan pembinaan anak berhadapan hukum di Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang Bagaimana Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial di Kota Makassar.
- b. Memberikan informasi atau data tentang Bagaimana Bentuk Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar.
- c. Memberikan informasi tentang peran pemerintah melalui program kesejahteraan sosial anak Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Satuan bakti pekerja sosial dalam melakukan pembinaan anak berhadapan hukum.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Peran

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang di harapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga di harap bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain. Menurut Horton dan Hunt [1993], peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status.¹

Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton [1968] dinamakan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan

¹Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi*, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga, h.128

peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, menerangkan bahwa peranan adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka dia menjalankan suatu peranan.³

Peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Gross Masson dan Mc Eachem yang dikutip oleh David Barry mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan – harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁴

Melihat dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh seorang individu ataupun kelompok merupakan suatu cerminan dari sebuah harapan dan tujuan yang akan dicapai terhadap perubahan perilaku yang menyertainya.

Peran juga merupakan suatu tugas utama yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup selaras bersama. Seperti yang telah dirumuskan tentang peran oleh beberapa ahli, maka peranan merupakan sebuah konsep mengenai apa yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai organisasi.

²Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga, h.129.

³Sarjono Arikunto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Press, 1989), h. 144.

⁴Sarjono Arikunto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Press, 1989), h. 145.

Unsur-unsur dalam peran merupakan pola prilaku yang dikatakan dengan status atau kedudukan peran ini dapat di ibaratkan dengan yang ada di dalam sandiwara yang pemainnya mendapatkan peranan dalam suatu cerita.⁵

- a. Peranan ideal yang di harapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu, peranan yang ideal merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dalam status tertentu.
- b. Peranan yang di anggap diri sendiri ialah merupakan hal yang oleh individu pada saat tertentu, artinya situasi tertentu seorang individu harus melaksanakan hal tertentu.
- c. Peranan yang harus di kerjakan ialah peran yang sesungguhnya harus di laksanakan oleh individu dalam kenyataan.

B. Teori Tentang Anak Berhadapan Hukum.

Menurut Symond, Problematika anak berdasarkan kepentingan perasaannya meliputi; problema kesehatan, seksual, keamanan, keuangan, kesehatan jiwa (takut, cemas dan frustrasi), kebiasaan dalam belajar, pengisian waktu terluang, sifat-sifat pribadi dan akhlak, hubungan keluarga, tingkah laku dan cara bergaul, daya tarik diri, perhatian terhadap masalah-masalah sosial, tanggung jawab dan sikap hidup, keserasian atau penyesuaian diri dengan orang lain serta pandangan hidup.⁶

⁵Soejona Soekamto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta : CV Rajawali,1982), h. 35

⁶ Zakiah Daradjat, *Problema Remaja di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 39 -

Anak memegang peranan penting dalam peradaban hidup manusia dari waktu ke waktu. Ketika anak menjadi sosok yang saleh, maka ia akan menjadikan masyarakat tenteram. Sebaliknya jika ada anak yang selalu melakukan pelanggaran di dalam masyarakat, maka akan menciptakan suasana resah dan menimbulkan kekacauan serta masa depan masyarakatnya menjadi suram. Karena pentingnya posisi anak dalam masyarakat, baik pengaruhnya terhadap keluarga dan lingkungan, maupun dalam hal persiapan penerus generasi sehingga mengharapakan dan mengusahakan keturunan yang baik perlu dilakukan.

Keterangan tersebut dapat dipahami melalui firman Allah dalam QS. Al-Luqman (31 : 17), sebagai berikut:

﴿الْأُمُورِ عَزَمَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ أَصَابَكَ مَا عَلَىٰ وَأَصْبِرَ الْمُنْكَرِ عَنْ وَأَنَّهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأُمَرَ الصَّلَاةَ أَقِمِ رَبِّنِي﴾

Terjemahnya:

Hai anaku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).⁷

Ayat di atas tersebut menyuruh mengerjakan ma'ruf, mengandung pesan untuk mengerjakannya karena tidaklah wajar menyuruh sebelum diri sendiri mengajarkannya. Demikian juga melarang kemungkaran menuntut agar yang melarang terlebih dahulu mencegah dirinya. Itulah yang menjadi sebab mengapa Luqman tidak memerintahkan anaknya melaksanakan ma'ruf dan menjauhi kemungkaran, tetapi memerintahkan menyeru dan mencegah. Disisi lain

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: As-Syifa, 1998), h. 42.

membiasakan anak melaksanakan tuntunan ini menimbulkan dalam dirinya jiwa kepemimpinan serta kepedulian sosial.⁸

Jika kebutuhan anak tidak sesuai dengan harapan maka akan menimbulkan masalah baru yaitu kenakalan remaja (anak). Kesenjangan antara tingkat kebutuhan dan kenyataan yang terjadi pada anak bahkan berpeluang menimbulkan tindakan pelanggaran hukum sehingga anak yang masih labil emosinya harus berhadapan dengan hukum. Proses hukum pada anak sebetulnya belum terlalu efektif dalam menyelesaikan persoalan sehingga dibutuhkan pendidikan atau pendampingan sosial lebih lanjut untuk perbaikan mental pada anak. Beberapa teori yang mendukung pentingnya pendampingan anak berhadapan dengan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan Kesejahteraan Sosial Anak

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).⁹ Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 309

⁹Pedoman PKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial, (Jakarta : 2010) Bab Pendahuluan h. 1

yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.¹⁰

Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.¹¹ Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

¹⁰Pedoman PKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial,(Jakarta : 2010) Bab Pendahuluan h. 2

¹¹Pedoman PKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial,(Jakarta : 2010) Bab Pendahuluan h. 2

Mengacu pada proses ini, maka terdapat 3 (tiga) tahap peradilan anak, tahap *pertama*, mencakup pencegahan anak dari tindak pidana. Tahap ini meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Tahap *kedua*, ditandai anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana. Tahap *ketiga*, resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.¹²

Oleh karenanya, dalam membangun sistem peradilan anak semestinya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (*due process*) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi *conditio sine quanon* karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite menginterpretasikan bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat khusus ini merupakan upaya perlindungan khusus karena anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*). Kerentanan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi rasionalitas dan justifikasi bagi Komite Hak

¹²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, BAB I Pasal 180

Anak untuk menekan negara mengupayakan suatu konstruksi sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan khusus. Hal ini disebabkan anak-anak rentan menjadi korban tindak kekerasan oleh aparat penegak hukum manakala ia ditangkap dan ditahan, seperti: pemukulan, penyiksaan, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi. Pada titik ini pula anak seringkali tidak didampingi atau tanpa kehadiran orang tuanya, pekerja sosial atau pengacara sehingga risiko mengalami kekerasan dan intimidasi semakin tinggi. Lebih jauh mereka juga berpotensi menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh individu-individu yang berada dalam institusi-institusi penegak hukum.

Tingkat kerentanan dan resiko mengalami kekerasan semakin tinggi dialami oleh anak perempuan, khususnya tindakan pelecehan seksual dan penyalahgunaan kewenangan selama penahanan dan investigasi. Dampak lebih jauh, mereka berpotensi terpapar HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Kemudian, isu yang terkait dengan tahanan atau narapidana perempuan, khususnya anak perempuan, berkisar pada keselamatan dan kenyamanan, yang mencakup isu kelembagaan, seperti penempatan ruang, fasilitas, dan pelayanan kesehatan reproduksi. Bahkan perempuan termasuk anak perempuan yang dicabut kebebasannya karena berjenis kelamin perempuan, berpotensi mengalami penganiayaan berbasis gender (*gender spesific torture*).¹³

¹³Wagiati Soetodjo Hukum Pidana Anak , Cetakan Pertama. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006). h. 9.

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) cakupan komponen dari sistem peradilan pidana, meliputi:

- a. Substansi hukum pidana (*substantive criminal law (law of crimes)*). fokus pada penentuan jenis tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan salah atau ilegal;
- b. Tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) , fokus pada penentuan kriteria untuk menetapkan seseorang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat memikul sanksi atas tindak pidana tersebut. Penetapan ini berdasarkan elemen mental atau kapasitas untuk melakukan tindak pidana.
- c. Proses tindak pidana (*criminal process*), fokus pada metode yang dipergunakan untuk menentukan aturan hukum pidana yang dilanggar dan mengidentifikasi seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.
- d. Hukuman pidana (*sentencing*), fokus pada hukuman yang harus ditanggung akibat tindak pidana yang dilakukan seseorang dan jenis-jenis hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.¹⁴

Sementara itu, Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 4 (empat) fondasi KHA yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3)

¹⁴Wagiati Soetodjo Hukum Pidana Anak , Cetakan Pertama. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006). H. 9 – 10.

- b. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2)
- c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6); Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).¹⁵

2. Kebijakan Pemerintah Melalui Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Dalam undang-undang tentang perlindungan anak, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Dalam undang-undang tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

¹⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, BAB I Pasal 1.

yang masih dalam kandungan.¹⁶ Meski demikian, khusus untuk penanganan anak berhadapan hukum oleh pekerja sosial oleh sakti peksos untuk anak yang berusia antara 6 – 18 tahun.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁷ Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan. Dalam undang-undang disebutkan bahwa Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.¹⁸

b. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:¹⁹ non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

¹⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, BAB I Pasal 1 ayat 1

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, BAB I Pasal 1 ayat 12

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, BAB I Pasal 1 ayat 14

¹⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, BAB I Pasal 2

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁰

c. Kewajiban dan tanggung jawab

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²¹

Khusus untuk perlindungan bagi anak berhadapan hukum diatur bahwa: Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 undang-undang perlindungan anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.²² Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

²⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Bab II (asas dan tujuan) Pasal 3

²¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, BAB II Tentang perlindungan khusus Pasal 64 ayat 1

²²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Tentang perlindungan khusus Pasal 64 ayat 2.

- 1) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
 - 2) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana khusus
 - 4) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
 - 5) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
 - 6) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
 - 7) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pedoman Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.²³

a. Kriteria Khusus Penerima Manfaat

Sasaran PKSABH diprioritaskan kepada anak-anak yang berperilaku nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga, serta masyarakat dimana anak tinggal. ABH yang mendapat bantuan diprioritaskan ABH yang berasal dari keluarga miskin. Berdasarkan pertimbangan ini sasaran penerima manfaat, terutama ditujukan kepada :

²³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, BAB I Tentang perlindungan khusus Pasal 64 ayat 2.

- 1) Anak dengan kenakalan yang melakukan pelanggaran norma sosial tetapi tidak dalam kategori tindak pidana sehingga tidak berhadapan dengan hukum, atau anak rentan melakukan kenakalan atau tindak pidana.
 - 2) Anak berhadapan dengan hukum (6 sampai di bawah 18 tahun) dari keluarga miskin, meliputi:
 - a) Anak dengan kenakalan yang telah diindikasikan melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sehingga berhadapan dengan proses hukum (termasuk mengalami penangkapan, penahanan, mengikuti proses peradilan, yang berstatus diversi, menjalani masa hukuman pidana, dan menjalani masa reintegrasi pada orang tua/keluarga).
 - b) Anak yang menjadi korban tindak pidana sehingga berhadapan dengan hukum.
 - c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana sehingga berhadapan dengan hukum.
 - 3) Keluarga miskin dari anak dengan kenakalan baik pelaku pelanggaran norma sosial maupun pelaku tindak pidana, serta korban dan saksi tindak pidana. Masyarakat yang diwakili oleh tokoh anak dengan kenakalan tinggal.
- b. Komponen Program
- 1) Pendampingan dalam pemenuhan kebutuhan identitas anak, seperti pengurusan pembuatan akte kelahiran dan lain-lain.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan fisik yaitu: makanan, pakaian dan sebagainya.
 - 3) Dukungan pemenuhan hak pendidikan, yang meliputi: bantuan transportasi, peralatan sekolah, seragam dll.

- 4) Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kesehatan, yang meliputi: pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
- 5) Penyediaan akses terhadap rumah perlindungan sementara / alternatif yang aman bagi anak
- 6) Bantuan pendampingan dalam pemenuhan kebutuhan akan pengasuhan yang layak.²⁴

C. Peran Pekerja Sosial

Sebagaimana peran dokter dalam sistem pelayanan kesehatan, guru dalam pelayanan pendidikan, guru dalam pelayanan pendidikan, maka pekerja sosial memiliki peran sentral dalam sistem pelayanan sosial. Sebagai buah profesi kemanusiaan, pekerja sosial memiliki seperangkat ilmu pengetahuan atau *body of knowledge*, keterampilan atau *body of skills* dan nilai atau *body of values* yang diperolehnya melalui pendidikan formal dan pengalaman profesional.

Ketiga perangkat tersebut membentuk pendekatan pekerjaan sosial dalam kliennya. Dalam garis besarnya, ada 4 (empat) peran profesi pekerja sosial antara lain:²⁵

1. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.

²⁴*Pedoman Pelaksanaan Satuan Bakti Pekerja Sosial*, Kementrian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta: 2014), h 5 – 48.

²⁵*Pedoman Pelaksanaan Satuan Bakti Pekerja Sosial*, Kementrian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta: 2014).

2. Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia disekitar klien.
3. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial.
4. Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial.

Organisai pekerja sosial di Indonesia terdiri dari organisasi yang bernaung di bawah pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas pemerhati, dan sebagainya. Organisasi pekerja sosial di bentuk berdasarkan masalah kesejahteraan sosial yang ada. Khusus untuk masalah kesejahteraan sosial anak yaitu, anak berberhadapan hukum di tangani oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), salah satu organisasi yang di bentuk pemerintah tentang pekerja sosial yang bertujuan untuk menjadi pendamping sesuai dengan bidang peksos yang ada.²⁶



²⁶*Pedoman Pelaksanaan Satuan Bakti Pekerja Sosial*, Kementrian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta: 2014).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan yang terintegrasi, yang penelaannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Dengan melihat unsur-unsur sebagai satu objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya. Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgent diperlukan pendalaman lebih lanjut.

Secara alternatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivistik (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti, orientasi politik, isu, kolaboratif atau orientasi perubahan) atau keduanya. Pendekatan ini juga menggunakan strategi penelitian seperti naratif, fenomenologis, etnografis, studi

grounded theory, atau studi kasus. Peneliti mengumpulkan data penting secara terbuka terutama dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data.¹

b. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Makassar, yang di dalamnya terdapat Anak Berhadapan Dengan Hukum dan mendapat pendampingan dari Satuan Bakti Pekerja Sosial. Penentuan lokasi ini didasari pada tingginya interaksi sosial di Kota Makassar sehingga penyebab atau akar masalah yang menyebabkan terjadinya masalah kesejahteraan sosial, terutama ABH turut meningkat. Dengan demikian, jawaban yang terbaru tentang permasalahan ABH bisa didapatkan melalui penelitian ini. Lebih rincinya lokasi penelitian berada pada beberapa tempat yaitu Sekretariat Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) Provinsi Sulawesi Selatan di **Jl. AP. Pettarani (di area sosial provinsi Sul. Sel)**, peneliti tentang ABH berada di sekitaran **Jl. Veteran** dan **Jl. Andi Tonro Kota Makassar**, dimana kasus kenakalan anak yang berujung kepada kasus ABH banyak terdapat di daerah yang telah disebutkan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi. Dengan demikian, sumber referensi penelitian ini difokuskan pada teori-teori sosial. Begitu pula dengan objek dan subjek penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi.

¹Prof. Dr. Emzir, M.Pd, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 28

Sosiologi tinjau secara harfiah atau bahasa, sosiologi sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu *'socius'* yang berarti teman atau kawan dan *'logos'* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi Sosiologi dapat disimpulkan bahwa ilmu yang mempelajari masyarakat sebagai kompleks kekuatan, hubungan atau jaringan interaksi.

Dalam kaitan metode intervensi, Modifikasi dari diskusi kelompok terfokus ini digunakan sebagai metode untuk melakukan pengidentifikasian kebutuhan ataupun masalah yang dialami masyarakat. Di samping itu modifikasi diskusi kelompok juga dapat digunakan untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.²

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh di lapangan seperti informasi yang bersumber dari pengamatan langsung lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan unsur pemerintah/Kementrian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan maupun data yang diperoleh dari Pekerja Sosial Anak (PKSA), Kepala Seksi Pelayanan Anak, Supervisor Satuan Bakti Pekerja Sosial Wilayah Sulawesi, dan Penyandang Masalah (PMKS) serta keluarganya.

b. Data Sekunder

²Isbandi Rutminto Adi, *Kesejahteraan Sosial: Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 50.

Sedangkan data sekunder berwujud dokumenter yang bersumber dari laporan Satuan Bakti Pekerja Sosial Cluster ABH Kota Makassar Tahun 2014, Data ABH dari arsip Sakti Pekos, Pedoman Pelaksanaan Kerja LKSA Satuan Bakti Pekerja Sosial, Undang – Undang Dasar RI, dan seterusnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan bertahap selama proses penelitian, muatan observasi antara lain profil LKSA, Kapasitas dan dasar hukum yang dimiliki Sakti Pekos, aktifitas serta progres kerja, lokasi kerja Sakti Pekos, dan juga kebenaran tentang penanganan klien.

2. Wawancara

Menurut Bimo Waligito bahwa pedoman interview adalah suatu alat yang digunakan dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data anak atau orang yang mengadakan hubungan secara langsung dengan informan (*face to relation*).³ Sedangkan Cholid Nurbukodan Abu Achmad mengemukakan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan bilamana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-

³Bimo Waligito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991), h. 68

informasi atau keterangan-keterangan.⁴ Makawawancara melibatkan Sakti Peksos, mitra kerja, klien, lembaga yang menaungi Sakti Peksos.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu langkah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, baik data-data tertulis, gambar, suara maupun gambar dan suara. Dokumentasi yang di miliki penulis berupa surat penelitian yang di sahkan oleh LITBANG Provisinsi Sulawesi Selatan, surat pernyataan kesediaan sebagai narasumber, satu rangkapskripsi, dan arsip laporan yang di miliki narasumber.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini antara lain daftar atau pedoman wawancara, rancangan observasi, perekam suara, kamera, buku catatan dan pulpen. Keseluruhan instrumen tersebut digunakan untuk melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. Instrumen penelitian di simpan dan sebagian ikut serta di cantumkan dalam lampiran skripsi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Mayoritas data yang dipergunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat kualitatif. Oleh karena itu,

⁴Cholid Nurbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 83.

dalam memperoleh data tersebut digunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif. Sehingga dalam mengelolah data, maka teknik analisis yang digunakan adalah *Analisis Komparatif*, artinya menganalisa data dengan jalan membandingkan antara satu pendapat atau data dengan data dan pendapat yang lain kemudian menarik kesimpulan. Jadi dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan penulis akan menggunakan teknik analisis data yang sifatnya perbandingan.⁵

Metode penelitiandi atas digunakan oleh penulis karena penelitian kualitatif ini membutuhkan data atau keterangan tentang peran sakti peksos dalam pembinaan anak behadapan hukum di Kota Makassar yang dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

⁵. Sutrisno Hadi. *Op.h.* 13

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam menyikapi kenyataan bahwa semakin luasnya permasalahan anak dan remaja yang ada saat ini, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Sosial RI membuat suatu program pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak remaja bermasalah/ anak nakal agar dapat menjadi generasi muda yang produktif dan berbudi pekerti yang luhur. Salah satu panti yang bertugas menangani hal tersebut adalah Panti Sosial Marsudi Putra "Toddopuli" Makassar yang mulai beroperasi pada tahun 2000, Lembaga kesejahteraan sosial Anak (LKSA) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Salodong membawahi Satuan Bakti Pekerja Sosial, objek pada penelitian ini adalah lembaga yang berkedudukan dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya Sakti Peksos memiliki koordinasi program dengan Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. LKSA PSMP yang berkantor di Makassar memiliki program yang di sebut Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).¹

Namun pada tahun 2014 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi gedung sekretariat Sakti Peksos yang bertempat di JL. AP. Pettarani No. 59 Kota Makassar, Oleh karena itu penelitian dan pengambilan data banyak di

¹*Profil PSMP Todopuli Makassar*, Kementrian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta: 2008)

lakukan di sana, hal ini di jelaskan penulis demi menghindari penafsiran yang berbeda tentang lokasi berkantornya Sakti Peksos.

Dalam menyelesaikan berbagai program PKSA yang telah disusun atau yang dihadapi oleh LKSA Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan maka dibutuhkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak (TKSA). Pelaksana kegiatan PKSA yang dibentuk sebagai TKSA adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial (PKSA).²

1. Tujuan dan Karakteristik PKSA

Tujuan program kesejahteraan sosial anak adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, eksploitasi dan diskriminasi; sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. PKSA dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat (*conditional cash transfer*), yang meliputi :

- a. Bantuan sosial/ subsidi pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar (akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal & air bersih, rekreasi, dan keterampilan).
- c. Penguatan tanggung jawab orang tua/ keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak

²Pedoman Pelaksanaan Satuan Bakti Pekerja Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta: 2014),h. 1/

d. Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak.³

Dalam mewujudkan tercapainya program kesejahteraan sosial anak, Kementerian Sosial telah menetapkan kriteria yang harus dimiliki oleh pekerja sosial anak yang dalam hal ini Satuan Bakti Pekerja Sosial. Kriteria pendamping yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Kategori Pekerja Sosial Profesional harus berlatar belakang pendidikan Pekerjaan/ Kesejahteraan Sosial,
- b. Kategori Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki kepedulian dan kompetensi dalam penanganan masalah sosial sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- c. Selain itu dalam PKSA juga mendayagunakan para relawan sosial yang berbasis komunitas lokal.
- d. Diutamakan memiliki pengalaman dalam pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- e. Diutamakan memiliki kemampuan mengolah data dengan komputer, khususnya bagi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
- f. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan organisasi/ lembaga / instansi lain
- g. Diutamakan berdomisili dekat dengan lokasi PKSA yang didampingi.⁴

³*Pedoman Pelaksanaan Satuan Bakti Pekerja Sosial*, Kementerian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta: 2014),h. 1-2.

⁴*Pedoman Pelaksanaan Satuan Bakti Pekerja Sosial*, Kementerian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta: 2014),h. 6.

2. Unit Pengelola PKSA

Unit pengelola PKSA bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan kriteria umum sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum atau tidak/belum berbadan hukum dan memiliki struktur organisasi dan tata kelola administrasi yang tertib.
- b. Memiliki program/kegiatan yang secara efektif dapat meningkatkan pemenuhan hak anak dan melindungi anak dari tindak kekerasan, keterlantaran, eksploitasi dan diskriminasi.
- c. Memiliki sarana prasarana organisasi yang mendukung pelaksanaan PKSA
- d. Pengalaman dalam penanganan anak yang mengalami masalah sosial
- e. Memiliki jaringan kerja yang luas.
- f. Memiliki sumber daya sarana prasaran, SDM dan sumber keuangan yang dapat disinergikan dengan PKSA⁵

3. Data Binaan Sakti Peksos untuk ABH di Kota Makassar

Penerima Program Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial adalah sebanyak 40 orang.

⁵*Pedoman Pelaksanaan Satuan Bakti Pekerja Sosial*, Kementerian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta: 2014), h.3-4.

Tabel 1. Penerima Program Pendampingan ABH di Kota Makassar.

No	Pendamping/saktipeksos	Jumlah penanganan ABH	Wilayah
1	Ermiyati	7 Klien	Kota Makassar
2	Muh. IkhsanHasyim	8 Klien	Kota Makassar
3	NurlaelaJufri	6 Klien	Kota Makassar
4	Satriani	3 Klien	Kota Makassar
5	Hasdiana	5 Klien	Kota Makassar
6	AswitaAmansyah	6 Klien	Kota Makassar
7	IbnuChaldon	5 Klien	Kota Makassar

Sumber: Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial Tahun 2014

Dari data yang disajikan pada tabel di atas, diketahui bahwa penerima program pendampingan anak berhadapan hukum di kota makassarpada tahun 2014 adalah 7 orang pendamping dan memiliki dampingan sebanyak 40 (empat puluh) orang. Penerima program dengan usia tertua adalah M. Hidayat yang lahir pada tanggal 9 Februari 2007 dalam usia 17 (tujuh belas) tahun dan penerima program yang termuda adalah Ahmad Fadil yang lahir pada tanggal 21 Mei 2005 dalam usia 10 (sepuluh) tahun.⁶

Dari 40 ABH yang didampingi, kebanyakan dari mereka yang berada pada usia 17 tahun, yaitu usia maksimal atau tertua yang di dampingin oleh Sakti Peksos Kota Makassar. Sementara untuk usia yang termuda adalah 10 tahun yang jumlahnya hanya terdapat 3 orang.⁷

Dari 40 (empat puluh) ABH yang didampingi, terdapat 7 (tujuh) orang pendamping. Pada tabel 1. tersaji data bahwa pendamping masing-masing memiliki

⁶Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial,(Makassar : 2014) h. 14.

⁷Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial,(Makassar : 2014) h.14.

jumlah klien yang berbeda, antara lain Muh. Ikhsan Hasyim mendampingi 8 (delapan) orang ABH, Ermiyati mendampingi 7 (tujuh) orang ABH, Nurlaela Jufri mendampingi 6 (enam) orang ABH, Satriani mendampingi 3 (tiga) orang ABH, Hasdiani mendampingi 5 (lima) orang ABH, Aswita Amansyah mendampingi 6 (enam) orang ABH dan Ibnu Chaldon mendampingi 5 (lima) orang ABH. Dengan demikian, diketahui jumlah dampingan atau binaan Sakti Peksos rata-rata adalah 5 sampai 6 orang. Dampingan terbanyak oleh Muh. Ikhsan Hasyim dan jumlah dampingan yang paling sedikit adalah Satriani dengan jumlah dampingan sebanyak 3 orang ABH.⁸

Sementara dari sejumlah ABH yang mendapat program pendampingan dari Sakti Peksos. Terdapat beberapa kasus yang menjadi latar belakang seorang anak harus berurusan dengan pihak penegak hukum. Penerima manfaat Pekerja Kesejahteraan Sosial ABH berdasarkan kasusnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁹

Tabel 2. Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial ABH TAHUN 2014 berdasarkan Kasus

No.	Jenis Kasus	Jumlah	Persentase (%)
1	Pencurian	10	25
3	Senjata Tajam	3	8
4	Pencabulan	2	5
7	Korban Pencabulan	2	5
9	Penganiayaan	7	18
10	Perkelahian	8	20
11	Perlindungan Anak	2	5

⁸Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial, (Makassar : 2014) h 15

⁹Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial, (Makassar : 2014) h 16-17

12	Pemerasan	1	3
13	Napza	1	3
14	Lakalantas	4	10
TOTAL		40	100

Sumber: Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial Tahun 2014.

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 2. Diketahui bahwa kasus terbesar yang diantara 40 orang ABH yang mendapatkan pendampingan Sakti Peksos berturut-turut adalah kasus pencurian dengan persentase 25 %, berikut Perkelahian sebanyak 20 %, Penganiayaan sebanyak 18 %, Lakalantas sebanyak 10 %, Senjata Tajam sebanyak 8 %, Pencabulan, Korban Pencabulan, dan Perlindungan Anak masing-masing 5 %. Sementara itu untuk pemerasan dan Napza masing-masing 3 %. Dengan demikian, kasus terbesar adalah pencurian dan kasus paling sedikit yang didampingi adalah Napza dan pemerasan.

Pasal hukum yang menjerat anak sebagaimana disajikan pada tabel 2 adalah sebanyak 14 kasus. Namun dari sejumlah kasus yang dihadapi ABH tidak semuanya memposisikan ABH sebagai pelaku. Berdasarkan kategorinya, ABH bisa dibagi menjadi ABH sebagai pelaku, ABH sebagai Korban, ABH sebagai Saksi dan Rawan ABH.

Penerima manfaat program kesejahteraan sosial berdasarkan kategorinya dapat dilihat pada tabel berikut.¹⁰

¹⁰Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial,(Makassar : 2014), h. 18.

Tabel 3. Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial ABH TAHUN 2014 berdasarkan Kategori ABH.

No.	Kategori ABH	Jumlah	Pesentase (%)
1	Pelaku	32	80
2	Korban	8	20
3	Saksi	-	0
4	Rawan ABH	-	0
TOTAL		40	100

Sumber: Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial Tahun 2014.

Dari total 40 (empat puluh) ABH yang mendapatkan program pendampingan dari Sakti Peksos, sebanyak 80 (delapan puluh) % diantaranya adalah dikategorikan sebagai pelaku dan 20 (dua puluh) % sisanya dikategorikan sebagai korban. Dengan demikian, tingginya kasus anak masih didominasi oleh pelanggaran hukum anak.

Sementara itu, dari sejumlah 40 orang ABH yang mendapatkan program pendampingan Sakti Peksos Kota Makassar didominasi oleh anak laki-laki. Gambaran tentang penerima manfaat program kesejahteraan sosial berdasarkan jenis kelamin yang didampingi sakti peksos sejak tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.¹¹

Tabel 4. Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial ABH TAHUN 2014 berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1	Laki-Laki	32	80,00
2	Perempuan	8	20,00
TOTAL		40	100,00

¹¹Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial,(Makassar : 2014) h 20-21

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4. dapat diketahui bahwa tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak laki-laki masih mendominasi dari pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perempuan. Perbandingan ABH berjenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah 80 % : 20 %.

Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar yang didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan menjerat anak pada usia rata-rata 15 tahun sebagaimana disajikan pada tabel 1 dan tabel 4 jika dilihat dari usia sekolahnya berarti kebanyakan telah beradapa pada kelas 9 tingkat Sekolah Menengah Pertama atau setingkat kelas 3 SMP. Gambaran tentang penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar berdasarkan Jenjang Pendidikannya yang didata sejak tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.¹²

Tabel 5. Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial ABH TAHUN 2014 berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Pesentase (%)
1	Tdk Lulus SD (DO)	2	5
2	Sekolah Dasar (masih sekolah)	5	13
3	Lulus SD	2	5
4	SLTP (masih sekolah)	12	30
5	Tdk Lulus SLTP (DO)	1	3
6	SLTA (masih sekolah)	17	43
7	Tidak Lulus SLTA (DO)	-	0
8	Lulus SLTA	1	3
TOTAL		40	100

¹²Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial,(Makassar : 2014), h. 21.

Sumber: Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial Tahun 2014.

Berasarkan data yang disajikan pada tabel 5. Diketahui bahwa jumlah kasus terbanyak untuk ABH di Kota Makassar adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) yang berstatus masih sekolah. Sementara itu terdapat 5 % ABH untuk siswa yang tidak lulus Sekolah Dasar di Makassar. Terdapat 13 % kasus ABH yang dialami oleh anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Sedangkan jumlah kasus ABH untuk siswa yang telah tamat Sekolah Dasar adalah 5 %. Data ini menunjukkan bahwa jumlah kasus ABH untuk anak pada jenjang Sekolah Dasar terbilang besar yaitu 23 %.

Anak berhadapan hukum untuk usia SLTP yang masih sekolah berdasarkan Laporan Sakti Peksos Kota Makassar yang masih sekolah sebesar 30 % dan siswa yang tidak lulus SLTP sebesar 1 %. Sementara itu, jumlah kasus ABH untuk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 43 % dan sebanyak 3 % ABH yang telah lulus SLTA.

Penerima manfaat untuk program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar sejak tahun 2014 berdasarkan aktivitas keseharian dapat dilihat pada tabel berikut.¹³

¹³Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial,(Makassar : 2014) h 22-23.

Tabel 6. Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial ABH Tahun 2014 berdasarkan Aktivitas Keseharian

No.	Aktifitas Harian	Jumlah	Pesentase (%)
1	Sekolah Formal	35	87,50
2	Kursus , Kejar Paket	-	0
3	Bekerja	1	2,50
4	Dirumah/Tdk Ada Aktivits	4	10,00
TOTAL		40	100

Sumber: Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial Tahun 2014.

Sajian data pada tabel 6. Menyebutkan bahwa kasus Anak Berhadapat Hukum di Kota Makassar lebih didominasi oleh anak yang berstatus pelajar. Terdapat 87,5 % ABH yang masih duduk di bangku sekolah. Sementara jumlah ABH yang tidak sekolah adalah 12,5 %, terdiri dari 2,5 % tidak sekolah karena alasan kerja dan 10 % yang tidak memiliki aktivitas.

B. Hasil Sajian Data

Sebagaimana catatan, permasalahan Anak Berhadapat dengan Hukum (ABH) sangat kompleks, mulai dari kasus, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, judi, narkoba, dan berbagai kasus lainnya. Apabila kasus hukum yang dihadapi oleh anak, jangan dipenjarakan tetapi mereka harus menjalani proses rehabilitasi, karena mereka masih dibawah umur. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus ABH lebih mengutamakan pendekatan pada keadilan yang berdasarkan prinsip-prinsip: perlindungan anak, kepentingan terbaik untuk anak, serta non diskriminasi. Anak tidak seperti orang dewasa dalam hal membutuhkan topangan,

sokongan dan perlindungan dari, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Perlindungan dibutuhkan oleh seorang anak karena adanya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis dan emosional. Sehingga dalam membangun sistem hukum peradilan pidana anak seharusnya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum padanya merupakan korban meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Atas dasar itu pula dalam sistem peradilan anak dipisahkan dengan orang dewasa agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat menikmati perlindungan hukum dan hak-hak yang melekat padanya. Berangkat dari kenyataan sebagaimana digambarkan di atas, maka penulis menganggap pentingnya keberlangsungan kerja Sakti Peksos dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Makassar.

Dari 40 ABH yang didampingi oleh Sakti Peksos, kebanyakan dari mereka yang berada pada usia 17 tahun, yaitu usia maksimal atau tertua yang didampingi oleh Sakti Peksos Kota Makassar. Sementara untuk usia yang termuda adalah 10 tahun yang jumlahnya hanya terdapat 3 orang. Diketahui bahwa kasus terbesar yang diantara 40 orang ABH yang mendapatkan pendampingan Sakti Peksos berturut-turut adalah kasus pencurian dengan persentase 25 %, Dengan demikian, kasus terbesar adalah pencurian sesuai data yang telah disajikan. Namun yang paling memprihatinkan adalah kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Makassar lebih didominasi oleh anak yang berstatus pelajar pada table 6 Terdapat 87,5 % ABH yang masih duduk di bangku sekolah.

C. Kinerja Sakti Peksos Kota Makassar

Secara konseptual, kinerja Sakti Peksos sangat membantu dalam pembinaan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Sakti Peksos yang direkrut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan kriteria yang harus di miliki Sakti Peksos yakni:¹⁴

1. Berpendidikan minimal S1 sarjana Sosial
2. Memiliki kepedulian dan kompetensi penyelesaian masalah sosial
3. Mampu mendaya gunakan lembaga terkait mitra kerja.
4. Di utamakan memiliki pengalaman dalam pelayanan sosial
5. Kemampuan mengolah data
6. Tidak terikat kerja dengan perusahaan / lembaga lain.
7. Berdomisili di sekitaran area dampingan.

Dengan demikian kinerja Sakti Peksos sejatinya dilaksanakan secara profesional, untuk itu maka dilakukan penelitian mendalam melalui pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Faisal salah satu ABH di Kota Makassar yang ditemui dirumahnya mengungkapkan.

“Awal mulanya saya merasa takut, karena trauma dengan kepolisian. Tapi setelah lama kenal dengan Kakakpembina, Saya mesara lebih baik dan bersahabat, Saya merasa senang karena Sakti Peksos orangnya ramah”¹⁵.

¹⁴ *Pedoman Pelaksanaa Satuan Bakti Pekerja Sosial*, Tentang Kriteria satuan Bakti Pekerja Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta : 2014).

¹⁵ Faisal, Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar, *Wawancara*, pada tanggal 3Maret 2014 di Jalan Andi Tonro Kanal Makassar.

Keterangan tersebut memberikan gambaran bahwasanya Sakti Peksos bisa mengubah paradigma ABH tentang penanganan kasus yang dilakukan oleh kepolisian. Karena pekerja sosial adalah orang yang bekerja untuk memperbaiki tatanan sosial, khususnya kesejahteraan sosial. Wawancara di atas sekaligus memberikan penguatan tentang karakter wajib Sakti Peksos yang tercantum pada poin 1 tentang kriteria.

Keterangan lain tentang kinerja Sakti Peksos berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Jordi Levinus, anak berhadapan hukum Kota Makassar saat ditemui dirumahnya mengatakan:

“Pada mulanya, saya merasa takut dengan Sakti Peksos karena saya kira bahwa Sakti Peksos akan memperlakukan ABH seperti perlakuan Polisi terhadap saya”.¹⁶

Sri Wahyuni salah seorang ABH Kota Makassar memberikan gambaran berbeda saat ditemui dirumahnya. Catatan yang diberikan bahwa Sakti Peksos jarang menemui kliennya dan juga Peksosnya membosankan. Keterangan tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagaimana berikut:

“Sebetulnya Kehadiran Sakti Peksos sangat baik bagi saya, tapi Sakti Peksos jarang datang untuk menemui. Saya bosan kalau Cuma di ajak ngobrol”.¹⁷

Sakti peksos Kota Makassar memang perlu mengevaluasi team kerja karena dalam beberapa orang ditemukan tidak memberikan kinerja dan pelayanan secara maksimal.

¹⁶Jordi Levinus, Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar, *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2015 di Jalan Toddopuli IV 30/3.

¹⁷Sri Wahyuni, Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2015 di Jalan Andi Tonro VI Makassar.

Berdasarkan keterangan wawancara di atas, menunjukkan bawah beberapa salah seorang Sakti Peksos belum sepenuhnya aktif menemui klien, juga bahwa sakti peksos cenderung membosankan bagi ABH. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan di sekretariat Sakti Peksos pada Kantor Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa dari beberapa kali peneliti melakukan tinjauan pada sekretariat tersebut, ditemukan dalam keadaan tidakada aktifitas atau kosong, namun mereka memiliki alasan yang jelas seperti yang di kemukakan oleh Muh. Ikhsan Hasyim.

“Aktifitas Sakti Peksos lebih sering di lapangan, kegiatan yang di lakukan yakni; mengurus administrasi kelembagaan, pendampingan klien, mempererat hubungan dengan mitra kerja seperti kepolisian dan Seksi Pelayanan Anak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya”¹⁸

D. Langkah Penanganan Dan Pembinaan Anak Berhadapan Hukum Di Kota Makassar

Adapun langkah – langkah yang di lakukan Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam penanganan ABH adalah sebagai berikut :¹⁹

a) Pengaduan Kasus

Menampung laporan tentang permasalahan anak berhadapan hukum dari lembaga/pihak terkait seperti : Seksi Pelayanan Anak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi

¹⁸Muh. Ikhsan Hasyim, Satuan Bakti Pekerja Sosial Kemeterian Kota Makassar. “Wawancara” pada tanggal 28 februari 2015 di kantor Seksi Pelayanan Anak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

¹⁹Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial,(Makassar : 2014) h 30-33.

Selatan atau Kota Makassar, Kepolisian, dan atau laporan langsung dari masyarakat terkait ABH.

b) Assesment Kasus

Melakukan assesmen terhadap kasus yang di laporkan oleh lembaga/pihak terkait. Assesmen yang di lakukan berupa peninjauan kategori/jenis kasus hukum, Biodata lengkap ABH, Latar belakang/motif, dan status hukum yang di sandang ABH saat assesmen berlangsung. Aktifitas ini sesuai dengan Kriteria Sakti Peksos poin ke tiga yaitu memberdaya gunakan lembaga yang terikat sebagai mitra kerja. Selanjutnya dicari data orang tua klien serta teman teman sepergaulan klien.

c) Advokasi Dan Aksi

Melakukan advokasi hukum terhadap ABH, jika klien dalam masa penyidikan maka advokasi lebih mudah di lakukan, namun jika vonis sudah di jatuhkan dan klien sudah di tetapkan status hukumnya maka proses advokasi sedikit lebih sulit di karenakan masa hukuman yang akan di jalani. Nur Layla Jufri mengemukakan kasus sebagai berikut. :

“Klientersangkadalamkasussenjatatajamberupabusur Pasal 2 (1) KUHP padabulandesember 2012 tepatnyahariseninklienpulangsekolah, klienkerumahtemannya yang tinggal di Jl. Mappaodang Makassar kemudianklienbertemudenganteman-temannyaitusehinggaklienikutbergabung, klienterpengaruhikutmenghisaplembersamatemannya di rumahkosong, tidak lama kemudiandipolisidatangmenangkapklientanteman-

temannya dan klien kedatangan membawakan jamber busur dan saat itu juga klien dibawa ke Polsek Tamalate Makassar untuk di minta keterangan.”²⁰

Setelah mengetahui gambaran sangkaan, selanjutnya dilakukan tindakan berupa pembinaan dan pendampingan sehingga keadaan klien menjadi lebih baik. Diketahui bahwa klien sudah beberapa hari tidak ke sekolah lagi karena menurut klien pihak sekolah tidak mau menerima klien sebagai murid sehingga sebagai pendamping berencana untuk melakukan mediasi ke sekolah klien agar klien diterima untuk bersekolah kembali. Penanganan ini dilakukan sesuai dengan langkah kerja Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam pedoman pelaksanaan kerja Tahun 2010 mengenai advokasi terhadap klien.

d) Penentuan Kategori Penanganan

Setelah advokasi hukum selesai maka sakti peksos menentukan *cluster* (Jenis PMKS), penentuan ini harus sesuai dari assessmen akhir yang dilakukan Sakti Peksos. Anak yang memiliki latar belakang pendidikan formal maka dapat dipastikan penanganan dilakukan di luar panti sosial, namun jika klien tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maka akan ditempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra yang berada di kawasan Sudiang Kota Makassar.

e) Pengembangan Potensi

²⁰Nur Layla jufri, SPV Satuan Bakti Pekerja Sosial Kemeterian Kota Makassar. “Wawancara” pada tanggal 30 Februari 2015 di kantor Seksi Pelayanan Anak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Setelah dilakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan konseling psikologis serta, selanjutnya Mengadakan kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan kegemaran klien, semisal :

1. Pengadaan kegiatan olahraga dan bahari yang bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pengadaan kegiatan pelatihan otomotif yang di laksanakan di bengkel PSMP Toddopuli Makassar
3. Pelatihan sastra dan seni, dimaksudkan guna menumbuhkan jiwa luhur dan santun dalam mengaktualisasikan perasaan.²¹

f) Pembinaan Kelurga

Adapun tugas lain dari Satuan Bakti Pekerja Sosial terhadap penanganan ABH adalah pembinaan, jenis kegiatan dalam pembinaan tersebut adalah Diskusi keluarga, kegiatan ini lakukan sesekali saat hari libur, keluarga dan sanak saudara di libatkan untuk memberikan pemahaman kelompok, doktrinisasi juga di adakan demi kesepahaman sikap yang baik kepada klien. Anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Sakti Peksos adalah anak yang telah dilaporkan oleh masyarakat atau anak yang dijemput di BAPAS. Jika memenuhi kriteria usia anak (ABH) maka anak akan di bina dalam bentuk konseling psikologis. Selain itu juga diberikan pemahaman terhadap orang tua ABH tentang pola pengasuhan anak yang terbaik. Keterangan ini

²¹Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial, (Makassar : 2014)

sebagaimana di ungkapkan oleh Aswita Amansya, Sakti Peksos Kota Makassar saat di temui di Sekretariat Sakti Peksos mengungkapkan bahwa.

“orangtua diberikan nasehat bahwa pendidikan yang terbaik bagi anak bukan di sekolah tetapi dari keluarganya sendiri. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah hanya sebagai pelengkap dan pendidikan keluargalah yang paling baik. Untuk itu tanggung jawab terbesar untuk seorang anak tetap berada pada keluarganya, dalam hal ini adalah orang tua”.²²

g) Pemahaman Kondisi

Jika pembinaan di atas telah di lakukan maka pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi klien dan sikap yang harus di ambil di sampaikan melalui dialog struktur masyarakat, maksudnya Pembina (Sakti Peksos) melakukan pendekatan sekaligus meminta bantuan kepada ketua RT, RW, atau Lurah setempat agar memberikan jaminan kenyamanan sosial kepada klien.

h) Pengamatan Perubahan Perilaku

Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum memiliki komponen program, antara lain berupa: 1). Bantuan sosial pemenuhan hak dasar anak, 2). Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, 3). Pengembangan potensi diri dan kreativitas anak sebagai program rehabilitasi sosial dan reintegrasi, 4). Penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan masyarakat serta penguatan kelembagaan pelayanan kesejahteraan sosial anak. Program yang telah di paparkan di atas

²²Aswita Amansyah, Satuan Bakti Pekerja Sosial Kemetrian Kota Makassar. “Wawancara” pada tanggal 26 februari 2015 di sekretariat Sakti Peksos pada Kantor Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

nantinyadiharapkanakanmenghasilkanperubahansikapatauperilakuterhadapanak yang berhadapandenganhukum untuk tidaklagimelakukanperbuatan yang dapatmelanggarhukum, anak kembalikesekolahserta orang tua/keluargadapatmemberikanpengasuhanandanperlindunganterhadapanaksehinggahak-hakdasarnyaterpenuhi.²³

i) Sudut Pandang Sebagai Mitra Kerja

Keterangan yang diberikan oleh Sakti Peksos menunjukkan bahwa pendampingan telah dilakukan secara maksimal, bentuk pembinaannya adalah dengan pendampingan luar panti sosial, bimbingan sosial serta penguatan keluarga yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku atau korban ABH menjadi lebih baik. Berdasarkan keterangan H. Sunniwati, S.Sos, Pekerja Sosial PSMP Toddopuli Makassar sekaligus partner kerja Sakti Peksos saat ditemui di ruang Peksos mengatakan bahwa:

“Sakti Peksos telah bekerja secara maksimal dan profesional. Bentuk pembinaan yang diberikan antara lain penguatan keluarga yaitu anak didik sebagaimana mendidik keluarga dan juga mempererat hubungan anak dan orang tuanya. Selain itu anak juga diberi bimbingan sosial tentang cara bergaul dan bertingkah laku yang tepat. Pendampingan ini dilakukan di luar panti dan luar lapas. Pendampingan lebih banyak dilakukan di rumah ABH”.²⁴

E. Peluang dan Tantangan dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar

1. Peluang Keberhasilan Penanganan ABH di Kota Makassar

²³*Pedoman Pelaksanaa Satuan Bakti Pekerja Sosial*, Tentang teknis pelaksanaan kerja, Kementerian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta : 2014). 24

²⁴H.Sunniwati, Pekerja Sosial Cluster ABH. “Wawancara” pada tanggal 04Maret 2015 di sekeretariat Peksos pada PSMP Toddopuli Makassar.

a. Pelaksanaan Pendampingan

Salah satu faktor pendukung terlaksananya pendampingan terhadap ABH antara lain adalah: Proses penanganan ABH hendaknya mengutamakan pendekatan restoratif, pendampingan yang sinergis antara lembaga-lembaga yang terkait baik penegak hukum maupun lembaga pemerintah termasuk tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus ABH, proses penanganan ABH dilakukan berbasis komunitas/masyarakat serta proses penanganan ABH Di tingkat lembaga penegak hukum harus responsif kebutuhan anak dan mengarah pada kepentingan terbaik anak.²⁵

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah daerah memfokuskan penanganan ABH melalui kinerja solutif selain penanganan di Rutan. Dukungan dan peran dari LSM di tingkat lokal mendorong pemerintah setempat mengembangkan sistem penyelesaian kasus hukum anak di tingkat masyarakat setempat;

c. Pelatihan Pemantapan Pendamping

Dengan dilaksanakannya bimbingan dan pemantapan kinerja sakti peksos, diharapkan kepada Sakti Peksos dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis pendampingan dalam rangka perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum sehingga program

²⁵Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial, (Makassar : 2014).

Kesejahteraan Sosial ABH ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal.

2. Tantangan dalam Penanganan ABH di Kota Makassar

Dalam melakukan pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar, Satuan Bakti Pekerja Sosial menghadapi beberapa kendala sehingga program kesejahteraan sosial anak melalui Sakti Peksos mengalami hambatan. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pembinaan anak berhadapan hukum di Kota Makassar antara lain:²⁶

a. Kesiediaan Klien untuk didampingi.

Salah satu tantangan bagi pekerja sosial adalah berhadapan dengan beberapa klien yang dalam hal ini adalah ABH yang tidak bersedia didampingi. Keadaan ini membuat Sakti Peksos harus berpikir dan mengambil langkah terbaik agar setiap ABH bisa mendapatkan pendampingan dengan memberikan materi-materi pembelajaran dan pengembangan diri.

Tentang sikap ABH yang tidak bersedia didampingi oleh pekerja sosial menurut Muh. Ikhsan Hasyim, Sakti Peksos yang ditemui di Ruang Sakti Peksos pada Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan:

“Salah satu hambatan dalam menjalankan tugas seorang pekerja sosial, terutama pada pendampingan anak adalah kesiediaan anak untuk didampingi. Bagaimanapun metode pembinaan yang diberikan pada ABH yang

²⁶Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial, (Makassar : 2014)

didampingi tidak akan memberikan hasil yang maksimal jika pendampingan tersebut tidak diinginkan oleh klien.”²⁷

b. Pihak Lapas tidak serta merta melepas ABH pada Pendamping

Dukungan dari seluruh pihak sangat penting dalam merealisasikan pembinaan ABH di Kota Makassar. Kinerja Pekerja Sosial yang dalam hal ini adalah Sakti Peksos tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal tanpa dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan ABH. Salah satu hal yang menghambat pelaksanaan pendampingan adalah pihak lembaga pemasyarakatan (Lapas) tidak serta merta melepas ABH kembali ke lingkungan masyarakat untuk mendapatkan pendampingan.

Pihak lapas yang mengambil alih ABH tidak gampang menyerahkan pada pekerja sosial ABH yang sementara berada dalam Lapas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Muh. Ikhsan Hasyim, Sakti Peksos yang diwawancarai di Ruang Sakti Peksos Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan:

“Salah satu kendala yang dihadapi Sakti Peksos untuk mendapatkan dampingan, khususnya ABH adalah pihak lapas belum mau melepas ABH yang sementara berada dalam binaan Lapas.”²⁸

c. Jabatan Fungsional bukan dari Latar Belakang Pendidikan Sarjana Kesejahteraan Sosial

²⁷Muh. Ikhsan Hasyim, Satuan Bakti Pekerja Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 3 Maret 2015 di Ruang Sakti Peksos Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

²⁸Muh. Ikhsan Hasyim, Satuan Bakti Pekerja Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 3 Maret 2015 di Ruang Sakti Peksos Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Kendala teknis yang dihadapi oleh Pemerintah adalah ketersediaan aparat yang bekerja secara profesional. Profesional yang dimaksud adalah pekerja sosial adalah alumni Sekolah Menengah Kejuruan atau mahasiswa kesejahteraan sosial. Sejauh pengamatan peneliti bahwa tidak semua aparat birokrasi kementerian sosial provinsi Sulawesi Selatan yang membawahi permasalahan anak memiliki latar belakang pendidikan dari kesejahteraan sosial.²⁹

Selain itu, pegawai yang membawahi permasalahan anak di Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tidak selalu berada di ruang kerja. Berdasarkan hasil observasi selama penelitian berlangsung, terdapat beberapa pegawai yang selalu nongkrong di belakang kantor saat jam kerja berlangsung.³⁰ Itu membuktikan bahwa profesionalisme dan kreativitas pegawai masih terbilang kurang.

d. Kesadaran Satuan Bakti Pekerja Sosial untuk Bekerja Maksimal

Harapan pemerintah dalam menangani ABH melalui bantuan Sakti Peksos masih saja mengalami beberapa kendala teknis. Kendala yang dimaksud adalah kurangnya dukungan dari Sakti Peksos untuk memberikan dampingan yang maksimal dan porsi waktu yang cukup.

Berdasarkan hasil observasi di sekretariat Sakti Peksos Kantor Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan di lapangan, menunjukkan sakti peksos tidak selalu hadir. Selama penelitian berlangsung, hanya terdapat beberapa orang yang

²⁹Observasi di Sekretariat Sakti Peksos Kantor Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

³⁰Observasi di Sekretariat Sakti Peksos Kantor Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

sering hadir bergantian dan memberikan laporan di sekretariat.³¹ Kondisi ini membuktikan bahwa Sakti Peksos tidak semuanya bekerja secara profesional. Diantara 7 Sakti yang menangani ABH di Kota Makassar, hanya beberapa orang yang aktif hadir di Sekretariat, termasuk diantara Sakti Peksos ada yang jarang melakukan pendampingan sosial terhadap ABH.

e. Kesadaran Masyarakat

Faktor lain yang menjadi hambatan dalam pembinaan anak berhadapan hukum di Kota Makassar adalah kesadaran masyarakat untuk mendukung pembinaan yang dilakukan oleh Sakti Peksos terhadap anaknya. Meskipun Sakti Peksos berusaha secara maksimal untuk mendukung terlaksananya program pendampingan anak, tetapi hasilnya tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh keluarga anak.³²

Nurlaela Jufri, Supervisor Satuan Bakti Pekerja Sosial Kota Makassar saat ditemui di sekretariat Sakti Peksos pada kantor Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan:

“Dukungan orang tua terhadap sakti peksos yang melakukan pendampingan terhadap anak sepertinya sangat bersyarat. Hal tersebut terlihat pada respon orang tua yang lebih senang dengan bantuan sosial yang diberikan daripada perbaikan mental anak.”³³

³¹Observasi di Sekretariat Sakti Peksos Kantor Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Maret 2014.

³²Laporan LKSA – Satuan Bakti Pekerja Sosial,(Makassar : 2014)

³³Nurlaela Jufri, Supervisor Satuan Bakti Pekerja Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 3 Maret 2015 di Ruang Kepala Seksi Pelayanan Anak Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari keterangan di atas, kendala lain yang di hadapi SAKTI PEKSOS adalah masalah pemahan terhadap bantuan. Paradigma berpikir masyarakat yang selalu menilai bantuan secara materi, ketidak sesuain ini berdampak pada lambannya penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikianlah penelitian Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Makassar ini dilakukan. Sebagai catatan penutup, berikut ini diuraikan beberapa catatan kesimpulan antara lain:

1. Secara konseptual, Kinerja Satuan Bakti Pekerja Sosial memiliki langkah-langkah yaitu :
 - a) Melakukan assesment kepada Klien, Keluarga, dan Latar Belakang permasalahan demi mencari muatan kasus yang di alami klien.
 - b) Melakukan kordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan demi penanganan yang lebih efektif. Serta memberikan alternative yang lebih relefan dengan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum
 - c) Melakukan penguatan mental klien dalam menjalani aktifitas akademik, dimana hak klien sebagai siswa sering kali di cabut karena kasus hukum yang di alami.
 - d) Melakukan pendampingan secara penuh hingga klien benar – benar siap di lepas, karna proses pembinaan juga mengacu pada sangsi yang di dapat klien jika saat advokasi klien sudah mendapat vonis.

2. Bentuk pembinaan yang dilakukan sakti prksos antara lain :

- a) Bimbingan Konseling
- b) Mengadakan kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan kegemaran klien semisal olahraga, otomotif, seni, dan lain sebagainya.
- c) Mengamatiperkembanganklien hingga kondisi mental anak dianggap sudah baik. Jika keadaan mental anak sudah baik, maka proses pembinaan diselesaikan.
- d) Melakukan Pembinaan kepada keluarga, masyarakat sekitar tempat tinggal klien.
- e) Intervensi terhadap pendidikan formal klien, dimana pentingnya sekolah sebagai sarana masa depan klien. Jika klien trauma dan enggan ke sekolah asal maka baiknya klien di pindahkan ke sekolah lain.

3. Peluang Keberhasilan Dan Hambatan Kerja

- a. Peluang Keberhasilan Penanganan ABH di Kota Makassar terdiri dari pelaksanaan Pendampingan yang sinergis dengan pemerintah dan lembaga kepolisian serta dukungan dari masyarakat. Selain itu, Pelatihan Pemantapan pada Pendamping juga menjadi fakto pendukung terselenggaranya pendampingan ABH.
- b. Sementara itu, terdapat Tantangan dalam Penanganan ABH di Kota Makassar antara lain; Kesiadaan Klien untuk didampingi, Pihak Lapas tidak serta merta melepas ABH pada Pendamping, Jabatan fungsional dari

lembaga-lembaga mitra Sakti Peksos bukan dari Latar Belakang Pendidikan Sarjana Kesejahteraan Sosial, Kesadaran Satuan Bakti Pekerja Sosial untuk Bekerja Maksimal dan kesadaran masyarakat belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan Pendampingan ABH.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk lebih meningkatkan peran satuan bakti pekerja sosial, khususnya di kota Makassar maka peneliti menyarankan pada Sakti Peksos dan seluruh jajaran yang terlibat dalam penanganan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar untuk mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

1. Meningkatkan peran dan kinerja dalam pembinaan anak berhadapan hukum sehingga masalah klien benar-benar telah selesai.
2. Memperbaiki pola pembinaan sehingga lebih menarik bagi klien, terutama muatan materi pembinaan yang diupayakan semaksimal mungkin.
3. Menjalinkan kerjasama terhadap seluruh kalangan, baik dari pemerintah, penegak hukum, relawan, maupun seluruh unsur masyarakat sehingga perbaikan mental anak bisa menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ambo Enre, *Dasar-dasar Penelitian Sosial Kependudukan*, Ujung Pandang: FIP IKIP, 1983.
- Ali, Mohammad, *Penelitian Pendidikan- Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, Cet. III. 1985.
- Amansyah, Aswita, Pekerja Sosial bidang Sakti Peksos, *Wawancara*, di kantor LKSA Salodong, kota Makassar, senin, 13 Oktober 2013.
- Iksan Hasym, Muhammad, Pekerja Sosial bidang Sakti Peksos, *Wawancara*, di kantor Kantor Satuan Bakti Peksos, kota Makassar, senin, 13 Oktober 2013.
- Profil PSMPTodopuli Makassar*, Kementrian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta: 2008)
- Pedoman Pelaksanaan Satuan Bakti Pekerja Sosial*, Kementrian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta: 2014)
- Faisal, Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar, *Wawancara*, pada tanggal 3 Maret 2014 di Jalan Andi Tonro Kanal Makassar.
- Levinus, Jordi, Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar, *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2015 di Jalan Toddopuli IV 30/3
- Sri Wahyuni, Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2015 di Jalan Andi Tonro VI Makassar.
- Ikhsan Hasyim, Muhammad, Satuan Bakti Pekerja Sosial Kemeterian Kota Makassar. “*Wawancara*” pada tanggal 28 februari 2015 di kantor Seksi Pelayanan Anak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
- Nur Laylajufri, SPV Satuan Bakti Pekerja Sosial Kemeterian Kota Makassar. “*Wawancara*” pada tanggal 30 februari 2015 di kantor Seksi Pelayanan Anak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sunniwati, Pekerja Sosial Cluster ABH. “*Wawancara*” pada tanggal 04 Maret 2015 di sekeretariat Peksos pada PSMP Toddopuli Makassar.
- Amansyah, Aswita, Satuan Bakti Pekerja Sosial Kemeterian Kota Makassar. “*Wawancara*” pada tanggal 26 februari 2015 di sekeretariat Sakti Peksos pada Kantor Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Cet. I. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Cet. X; Jakarta: Rineka Cipta 1996.

- Bahan Penataran, *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P-4, BP-7, 1994
- Bakry, Nazar, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta : Pedoman Jaya, Cet. I. 1995.
- Baso, Kamaruddin, *Renungan Pribadi dalam rangkuman 5000 Mutiara Hikmah*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1990
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif – Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Edisi I, Jakarta; Prenada Media, 2005.
- Daradjat, Zakiah, *Problema Remaja di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: As-Syifa, 1998
- Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Anggaran PKSA, Jakarta: 2010
- Hadi, Sutrisno, *Statistik 2*, Yogyakarta; YPEP UGM, 1986.
- Pemerintah Provinsi Derahistimewah Yogyakarta.
 “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,” *Official Website Yogyakarta*
Pemerintah Provinsi Derahistimewah
<http://www.dinsos.pemdadiy.go.id/index.php?option=content&task=view&id=17>, 17 September 2014
- Rafida al-Hafids, Ayu, *Konsep Diri Remaja Laki-laki yang Berhadapan Dengan Hukum*, Penelitian Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegipranata Semarang 2012
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 10 dan 14*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sudjana, Nana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah-Skripsi-Tesis-Desertasi*, Cet. VI, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Sudaryanto, Agus, *Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Sosiologischer terhadap Implementasi UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 3 Tahun 1997)* Penelitian Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang perlindungan Anak*.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991

Paul.B, Horton, dan L. Hunt, Chester, 1993. *Sosiologi*, Jilid 1 Edisi Keenam,
(Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga,
h.128

